

# BPK Puji Kalbar Satu-satunya Mengaudit Masalah Aset



**PONTIANAK (MED)** - Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah melakukan pemeriksaan aset di lingkungan Pemerintah dengan mengadakan kerjasama dengan BPK RI untuk diaudit, ini adalah langkah awal yang sangat baik dalam menuju keterbukaan dan ketertiban dalam mengelola aset Pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan aset, ada beberapa aset yang boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga, itu dibolehkan dengan peraturan pemerintah No 6 Tahun 96, artinya ada dasar hukumnya, apabila dianggap perlu kontribusinya dianggap rendah tinggal dinegosiasikan. DPRD juga harus mendorong, tanpa kita harus ribut-ribut, tanpa kita harus berdebat dikoran

duduk bersama antara pihak Pemda yang bertugas mengelola aset dengan pihak yang dikerjasamakan apakah itu Swasta, BUMD duduk bersama, demikian disampaikan Kepala BPK RI di Gedung DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar atas manajemen Aset Pemda Prov Kalbar tahun 2011.

Lanjutnya, aset-aset yang dihibahkan pemerintah Pusat yang belum jelas statusnya tinggal kita lihat, kalau memang menurut DPRD barang tersebut perlu dihapuskan, BPK bisa membantu bisa membantu menilai dan menyarankan apa yang tepat untuk status aset.

Perwakilan BPKP di daerah memang ditugaskan untuk membantu Pemda, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2010. Jadi keberadaan BPKP sifatnya membantu bukan memeriksa terhadap pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keuangan daerah, terutama persoalan aset.

Memang semua SKPD sampai ke Kabupaten/Kota dibuat sibuk oleh

Gubernur untuk mencari sertifikat menertibkan masalah aset di masing-masing organisasi, hingga para anggota Dewan, BPN seta Perwakilan BPK Kalbar sibuk mencatat mendokumentasikan hal yang berkaitan dengan aset.

Persoalan yang muncul berkaitan dengan aset ini bukanlah zamannya Gubernur sekarang (Drs.Cornelis,MH), tetapi persoalan ini sudah sejak Provinsi Kalbar berdiri tidak pernah dilakukan potret evaluasi yang total, untuk itu mari bersama-sama kita menyelesaikan persoalan yang dipaparkan BPK Sampai dengan semester I tahun 2011 dari anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar senilai 1,4 triliun lebih, realisasinya sampai saat ini hanya 400 milyar lebih, ini harus menjadi perhatian kita bersama khusus tentang melanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan lainnya tingkat realisasinya hanya 11 %. Ini terjadi memang ada proses yang harus dijalani seperti pelelangan yang harus dilaksanakan.

DPRD diharapkan dapat mendorong para birokrat ikut memberi spirit dalam pengguna anggaran.

Kepala BPK RI juga memberi dorongan kepada Kepala Dinas / Badan untuk tetap bekerja dalam mengelola anggaran sesuai dengan peraturan. "Jangan takut dikejar-kejar oleh siapapun, asalkan kita bekerja dengan benar,"tegasnya.

Berkaitan Pengelolaan aset, ada beberapa aset yang boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga, itu dibolehkan dengan peraturan pemerintah No 6 Tahun 96, artinya ada dasar hukumnya.

Kepala BPK RI sebelumnya menyerahkan memori hasil pemeriksaan masing-masing kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar. Rapat Paripurna dihadiri 29 orang anggota Dewan dari 55 orang, Unsur Muspida, Para Kepala Dinas Badan. **(Syur/hms)**

Harian  
**Mediat**<sup>OR</sup>  
Maju Erlama Masyarakat

Rabu, 9 November 2011